

**SINERGITAS TNI DAN BNPB DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PALU GUNA MENINGKATKAN PERTAHANAN NIRMILITER DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA**

Oleh

Joni Sulistiawan<sup>1)</sup>, Ikhwan Syahtaria<sup>2)</sup>, Dohar Siantur<sup>3)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>4)</sup>, Herlina Juni Risma Saragih<sup>5)</sup>, Ernalem Bangun<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Republic Indonesia of Defense University, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec.

Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Email: [1kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

**Abstrak**

Pada tahun 2018 lalu, terjadi bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah yang menimbulkan kerugian baik dari jumlah korban dan kerusakan sarana-prasarana. Bencana alam yang terjadi di kota Palu terjadi dalam tiga jenis bencana yaitu, gempa bumi, tsunami dan likuifasi. TNI sebagai bentuk penyelenggaraan OMSP TNI, bertanggungjawab untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana, bersama BNPB. Salah satu unsur pelaksana TNI dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan bencana alam adalah PRCPB TNI. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dan dikoordinasikan dari sinergitas kedua lembaga, yaitu mengoptimalkan sinergitas dengan K/L dan instansi lain, komposisi pasukan, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah teori Sinergitas, teori penanggulangan bencana, teori peran, teori pertahanan negara dan teori pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Bencana yang melanda kota Palu dan beberapa wilayah Sulawesi Tengah lainnya memperlihatkan bahwa otoritas pemerintah setempat juga tidak sepenuhnya memahami alur dan prosedur penanganan bencana dengan cepat. Ketika terjadi bencana, baik pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak siap. Pemerintah melalui BNPB, BPBD, dan TNI mengirimkan personel bantuan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Palu tahun 2018. Khususnya TNI melalui PRCPB beberapa satuan telah mengirimkan pasukan untuk menjalankan misi kemanusiaan sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sinergitas antara TNI dengan berbagai pihak dari BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah di Kota Palu berjalan dengan baik. Namun demikian tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan, ego sektoral masih kerap terjadi. Model Sinergitas TNI dan BNPB yaitu dengan membentuk Puslatma bencana agar gap dan masalah komando, Kerjasama, komunikasi dan koordinasi dan masalah lainnya dapat diatasi.

**Kata Kunci: Sinergitas, BNPB, TNI, Penanggulangan Bencana Alam, Palu**

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang tertinggi di dunia (high risk disaster country), memiliki posisi berada di antara tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng samudera Hindia-Australia, lempeng samudera Pasifik, dan lempeng benua Eurasia. Pertemuan tiga

lempeng aktif yang terjadi mengakibatkan Indonesia memiliki kondisi geologis dan geomorfologis yang kompleks. Secara geologis berdampak pada tingginya potensi gempa bumi tektonik, tanah longsor dan tsunami. Hal ini disebabkan karena interaksi lempeng tektonik yang dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dihadapkan pada

wilayah pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, wilayah Indonesia mempunyai risiko sangat tinggi mengalami tsunami. Posisi Indonesia juga berada di jalur lingkaran gunung berapi (the ring of fire) dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Gunung berapi yang ada kurang lebih 80, membujur dari Barat sampai ke arah Timur. Dampak yang akan terjadi sangat besar terhadap potensi letusan gunung berapi dan gempa vulkanik. Indonesia juga mengalami fenomena perubahan iklim (climate change) sebagai akibat pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim ekstrim. Hal ini memicu terjadinya banjir, banjir bandang, dan erosi di sebagian wilayah.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, lokus penelitian akan terpusat pada kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Palu Donggala tahun 2018 silam. Damarjati, D. (2018) dalam artikel beritanya menginformasikan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Palu dan Donggala diguncang gempa bermagnitudo 7,4 dengan pusat gempa ada pada kedalaman 10 km, jaraknya ada di 27 km sebelah timur laut Donggala. Selanjutnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengaktivasi peringatan dini tsunami, status siaga untuk pantai Donggala barat dan waspada untuk Donggala utara, Mamuju, dan Kota Palu bagian barat. Tsunami setinggi hampir 6 meter dengan kecepatan 800 km/jam menerjang Pantai Talise, ketinggian ombak meraih baliho tinggi dekat pantai. Hingga 20 Oktober 2018, korban tewas akibat bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah itu mencapai 2.113 jiwa, sebanyak 1.703 jiwa di antaranya ada di Kota Palu. Sebanyak 4.612 orang mengalami luka berat. Ada 223.751 orang mengungsi di 122 titik. Menurut catatan akhir tahun BNPB, angka korban jiwa diperbaharui. Korban meninggal sebanyak 2.101 jiwa, sebanyak 1.727 jiwa di antaranya ada di Kota Palu, 188 jiwa di Sigi, 171 jiwa di Donggala, 15 jiwa di Parigi Moutong, 1 jiwa di Pasangkayu. Adapun

korban hilang sebanyak 1.373 jiwa. Korban luka-luka ada 4.438 jiwa. Sebanyak 221.450 orang mengungsi. Dampak kerugian senilai Rp 2,89 triliun, dampak kerusakan senilai Rp 15,58 triliun. (Damarjati, D., 2018).

Permasalahan atau gap di lapangan pada pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh TNI dan BNPB yaitu terkait dengan regulasi baik itu UU No 34 Tahun 2004 maupun UU No 24 Tahun 2007 yang belum mampu dengan jelas mengatur pelaksanaan, kerjasama maupun anggaran diantara dua instansi tersebut. Selanjutnya masih terbatasnya kemampuan dan kekuatan TNI dan BNPB baik dari SDM, Alutsista, Sarpras maupun peranti lunak yang dimiliki. Disamping itu belum terwujudnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI dan BNPB di lapangan yang baik, sehingga muncul ego sektoral dan terkesan bekerja sendirisendiri. Dari permasalahan/gap diatas terindikasi bahwa Sinergitas TNI dan BNPB dalam penanggulangan bencana belum terlaksana dengan baik sehingga perlu ada langkah-langkah strategis untuk mewujudkan sinergitas TNI dan BNPB yang kuat dan harmonis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan mengamati Sinergitas TNI dan BNPB dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu guna memperkuat Pertahanan Negara. Selain daripada aspek yang berkaitan dengan kebencanaan, tentunya unsur Sinergitas dalam rangka penanggulangan bencana akan diamati yang menyangkut peran TNI membantu kegiatan penanggulangan bencana, khususnya di Palu pada tahun 2018 silam.

## LANDASAN TEORI

Sinergitas antar aktor kepentingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, Sinergitas juga merupakan kombinasi

atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya (Najianti dalam Rahmawati et al. 2014). Sinergitas antar aktor kepentingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, Sinergitas juga merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya (Najianti dalam Rahmawati et al. 2014).

Lebih lanjut, Covey, S.R. (2010) menjelaskan bahwa sinergi (Synergy) merupakan kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan antara anggota tim. Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan hasil menakjubkan seperti hal-hal atau alternatif baru yang dahulunya tidak ada. Daft, R. D (2002) menggambarkan terjadinya Sinergitas sebagai kondisi yang muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berinteraksi untuk menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Dapat dipahami bahwa Sinergitas adalah perpaduan beberapa inti/beberapa elemen yang dipadukan secara bersama memberikan hasil lebih banyak dan lebih baik daripada manakala mereka bekerja sendiri-sendiri.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Sugiono (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang instrument kuncinya terletak pada peneliti, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan hasil

penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang pendekatannya mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dideskripsikan menggunakan numerikal atau angka. Lebih lanjut, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologis. Kuswarno, E. (2009) mendeskripsikan bahwa pendekatan ini mencari pemahaman mendalam, serta berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Studi dengan pendekatan fenomenologis berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanggulangan bencana memerlukan kecepatan dan ketetapan hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan dalam penanganan suatu bencana yang terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kesiapsiagaan sangat dibutuhkan dalam rangka penanganan awal terjadinya bencana, harus diakui TNI merupakan satusatunya institusi yang mampu digerakan/dimobilisasi dengan cepat baik personel maupun perlengkapannya sebagai pioneer Ketika bencana terjadi. Namun yang terjadi instansi lain seperti BNPB, BPBD, Pemda dan lain-lain masih sering terkendala pada pengerahan personel maupun material dan terkadang birokrasi yang sering menghambat kecepatan bergerak guna penanganan bencana. Disamping itu juga ketepatan pemberian bantuan kepada korban kurang tepat sasaran dan lambat. Hal tersebut diatas perlu adanya peningkatan sinergitas semua pihak terutama TNI dan BNPB terutama untuk akselerasi penanganan bencana. Seyogyanya BNPB berkoodinasi BPBD setelah dinyatakan status darurat bencana nasional/daerah sesuai dengan kewenangannya segera berkoordinasi dengan TNI untuk bersama-sama mengerahkan personel dan perlengkapan secepat mungkin ke daerah yang terdampak bencana agar dapat

mengendalikan situasi di wilayah tersebut. Seperti halnya yang disampaikan menurut Pressy, Davis dan Rimm (dalam Gunarsa, 2003) menyatakan bahwa akselerasi adalah melaju lebih cepat, proses mempercepat, peningkatan kecepatan ataupun percepatan laju perubahan kecepatan

Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayani (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring dengan pernyataan di atas pada tataran koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana yang sudah terlaksana masih compang camping hal ini disebabkan sistem komunikasi yang belum sejalan disamping SOP (standart operating procedure) belum ada standarisasi yang sama diantara instansi terkait. Oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan SOP bersama dan penyempurnaan pola dan standar penanganan bencana secara nasional yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi semua stakeholder kebencanaan, disinilah peran TNI dan BNPB sebagai leading sektor untuk merumuskan, finalisasi dan sosialisasi. Sehingga mana kala bencana terjadi seluruh komponen bangsa dalam hal penanggulangan bencana menggunakan SOP dan pola standarisasi penanggulangan yang sama, dengan demikian komunikasi, koordinasi dan keterpaduan serta garis komando jelas guna menekan resiko bencana yang ditimbulkan

Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan

pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu (Suryana;2010). Ketika terjadi bencana seluruh sumber daya nasional maupun daerah dapat digunakan ataupun dimobilisasi guna mendukung penanggulangan bencana, sesuai dengan pernyataan di atas bahwa pemberdayaan personel, alpa, sarpras dan lainnya yang dimiliki seluruh stakeholder digunakan untuk saling melengkapi, memberi manfaat dan menutupi segala kekurangan dalam mendukung penanganan bencana yang sedang melanda. Karena selama ini masih dirasa sangat kurang dalam pemberdayaan aset-aset yang ada guna mendukung keberhasilan penanggulangan bencana. TNI dan BNPB sebagai leading sektor harus dapat menginventarisir seluruh aset-aset sumber daya nasional dan daerah yang dimiliki yang sewaktu-waktu dapat diberdayakan secara maksimal untuk penanggulangan bencana. Hal ini perlu diperkuat dengan adanya MoU (memorandum of understanding) dengan masing-masing lembaga baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak ada lagi kegamangan dalam mobilisasi SDN nantinya.

Menurut (Rachmat, 2004:40) “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan. Kemitraan yang terbangun selama ini masih sangat minim terutama dengan pihak swasta, padahal pihak swasta banyak memiliki sumber daya yang mampu untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, sehingga peran swasta sangat kecil, sementara sebenarnya swasta memiliki potensi yang besar. TNI dan BNPB bersinergi mendorong, berkoordinasi dan melaksanakan sosialisasi kepada pihak swasta tentang mekanisme kemitraan Lembaga negara dan pihak swasta untuk bersama – sama menghadapi musuh yang nyata yaitu terjadi bencana guna memperkuat pertahanan negara

yang menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh warga negara. Untuk menjawab dan meningkatkan sinergitas TNI dan BNPB dalam penanggulangan bencana yang diharapkan diperlukan suatu model sinergitas yang lebih aplikatif dengan didasarkan pada evaluasi dan ide serta gagasan yang cocok untuk meminimalisir permasalahan yang biasa timbul pada setiap fase penanggulangan bencana. Dengan harapan upayaupaya yang sudah dijelaskan dapat terealisasi dengan baik, model yang ditawarkan pada hakekatnya menyempurnakan sinergitas yang sudah terbentuk dan terjalin sampai dengan saat ini. Model sinergitas adalah dengan membentuk organisasi gabungan terpadu dapat disebut Pusat Latihan Bersama Bencana (Puslatma Bencana) dibawah Ka BNPB yang secara garis besar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kursus dan kepelatihan kebencanaan yang melibatkan seluruh personel TNI, BNPB dan K/L Pemerintah dan swasta yang ditunjuk sehingga dapat diwujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan SDM.
- b. Menyelenggarakan kepelatihan untuk pengawak pelatih guna mendukung operasional kursus dan pelatihan.
- c. Menyelenggarakan Latihan geladi posko dan geladi lapang untuk menguji kemampuan SDM dan uji rencana kontijensi gabungan
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan Latihan Bersama dengan negara luar dan study banding kebencanaan.
- e. Merencanakan, membuat dan mengevaluasi kurikulum serta silabus kursus dan Latihan
- f. Menyelenggarakan workshop dan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di seluruh wilayah
- g. Menyiapkan, membina dan memobilisasi SRC PB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang ada di masingmasing Provinsi untuk menggandakan kemampuan PRCPB TNI atau Satgas PB TNI.
- h. Menyelenggarakan perekrutan personel untuk dilatih dan mengisi SRC PB serta pengawak Pusat Latihan Bersama Bencana tersebut. Puslatma Bencana dibentuk untuk menyatukan pola sikap, pola tindak, kesamaan SOP kebencanaan, peningkatan kemampuan SDM, terjalinya komunikasi, koordinasi dan mampu memobilisasi SRC PB dengan cepat dan tepat yang diawaki oleh seluruh personel stakeholder yang sudah terlatih dan dibekali pengetahuan kebencanaan. Hal ini juga mempunyai tujuan agar gap antar BNPB dan BPBD yang semula tidak ada garis komando dapat terwadahi oleh Puslatma bencana pusat dan Puslatma bencana provinsi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sinergitas TNI dan BNPB tanpa mengesampingkan stakeholder lainnya dalam melakukan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami Palu, TNI mengirimkan pasukan beserta alutsistanya yang tergabung dalam PRCPB TNI yang tentunya bekerjasama dengan personel dari BNPB, BPBD Sulawesi Tengah serta unsur lainnya. Dengan mengutamakan enam penanganan

prioritas, yaitu melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, pemakaman jenazah, percepatan pemulihan jaringan listrik, percepatan pengadaan bahan bakar, distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi dan percepatan jaringan komunikasi. Bencana yang melanda kota Palu dan beberapa wilayah Sulawesi Tengah lainnya memperlihatkan bahwa otoritas pemerintah setempat juga tidak sepenuhnya memahami alur dan prosedur penanganan bencana dengan cepat. Ketika terjadi bencana, baik pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak siap.

- b. Model Sinergitas TNI dan BNPB dalam penanggulangan bencana yaitu berlaku pada 3 fase penanggulangan bencana namun hal tersebut masih belum terlaksana maksimal karena belum menyeluruh ke semua wilayah di negara, sebagai contoh dalam mitigasi bencana dengan cara penyuluhan menghadapi bencana dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat hanya terlaksana tidak semua daerah. Salah satu hal penyebabnya adalah tidak ada garis komando antara BNPB dan BPBD, tidak seperti TNI yang mempunyai garis komando yang jelas, sehingga tercipta gap dan ketidaksinkronan program-program pusat dan daerah. Sehingga penanggulangan bencana di Palu juga masih belum maksimal dikarenakan faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas. Oleh karena itu perlu langkah yang solutif untuk mengatasi kendalagenda diatas yaitu model sinergitas TNI dan BNPB dengan membentuk organisasi Puslatma bencana dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan penanggulangan

bencana kedepan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188.
- [2] Arief Midhio, I Wayan, Risman, Helda, Anwar, Syaiful, and Prakoso, Lukman Yudho, R. (2021). Makassar War in the Perspective of the Indonesian Total War. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(J. Soc. Polit. Sci.), 230–238.
- [3] Covey, Steven R. 2010. The 7 Habits of Highly Effective People(7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif). Tangerang: Binarupa Aksara Publisher.
- [4] Daft, Richard. 2002. Manajemen, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- [5] Damarjati, D. 2018. Sore di Palu dan Donggala: Gempa, Tsunami dan Likuifaksi. Diakses di [https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-dipalu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi\\_pada\\_19\\_April\\_2021](https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-dipalu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi_pada_19_April_2021).
- [6] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *ITALIENISCH*, 11(2), 120–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103>
- [7] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>

- [8] Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., Risman, H., La Ode, M. H., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasanuddin International Airport). *Sciences*, 4(2), 76–86. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.277>
- [9] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. *The 3th Indonesia International Defense Science Seminar*, 2(Universitas Pertahanan), 483–490.
- [10] Kusuma, A. W., Lukman Yudho Prakoso, Sianturi, D., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). THE COOPERATION BETWEEN FLEET I COMMAND AND INDONESIAN MARITIME SECURITY AGENCY IN ELIMINATING TRANSNATIONAL CRIME IN THE MALACCA STRAIT. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(03), 51–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2021.4305>
- [11] Kuswarno, E. (2009). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Bandung: Widya Padjajaran
- [12] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Asep Iwa Soemantri- Editor: Budi Pramono, R. (2021). *Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut* (R. Budi Pramono (Ed.); 1st ed.). Unhan Press.
- [13] Nizar, A. A., Pramono, B., Gunawan, R., & Prakoso, L. Y. (2021). Handling Social Conflicts in The Context of A Military Campaign Strategy ( Study in The Working Area of The Balik Papan Police Resort ). *International Journal of Social Science And Human Research*, 04(05), 1205–1209. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-40>
- [14] Peraturan Menteri Pertahanan No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana.
- [15] Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- [16] Permenhan RI No. 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2015-2019.
- [17] Prakoso, L. Y. (2021). Defense Policy Analysis to Deal with Radicalism and Terrorism in Indonesian Universities. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1).
- [18] Rahmawati, Triana et al.(2014) Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647
- [19] Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [20] Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- [21] Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN